

# Rancangan Sistem Informasi Dokumentasi Kependudukan di Desa Jatiwaringin

Setiawan<sup>1</sup>, Suhaeliah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen STMIK Bina Sarana Global, <sup>2</sup>Mahasiswa STMIK Bina Sarana Global  
Email : <sup>1</sup>setiawan@stmikglobal.ac.id, <sup>2</sup>elzhulia@gmail.com

**Abstrak**— Desa Jatiwaringin terletak di kecamatan Mauk kabupaten Tangerang. Petugas desa Jatiwaringin awalnya membuat dokumen-dokumen kependudukan dengan menggunakan mesin ketik. Setelah mendapat bantuan dari pemerintah berupa komputer, printer, dan lainnya petugas desa mulai menggunakan komputer untuk membuat dokumen kependudukan, akan tetapi hanya sebatas pada pembuatan surat pengantar kartu tanda penduduk dan surat keterangan lainnya. Untuk pendataan kelahiran, kematian, dan lainnya masih dicatat dalam buku secara terpisah. Pendataan penduduk yang dicatat di buku secara terpisah mempunyai banyak kelemahan, diantaranya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan data, sulitnya pencarian data, kemungkinan data rusak atau hilang, pembuatan laporan yang lambat dan kurang akurat. Setelah melakukan analisa berkaitan dengan permasalahan diatas maka peneliti mengusulkan sebuah sistem informasi dokumentasi kependudukan berbasis komputer yang mampu mengelola data kependudukan dan membuat laporan kependudukan dengan cepat, tepat dan akurat. Sistem informasi yang diusulkan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan metode perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* yang akan menghasilkan *output* berupa informasi mengenai data kelahiran, kematian, serta laporan data kependudukan. Sistem informasi dokumentasi kependudukan ini diharapkan dapat membantu petugas desa dalam pengelolaan data kependudukan dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

**Kata kunci**— Sistem Informasi, Dokumentasi Kependudukan.

## I. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu pemerintahan yang bertugas mengatur, mengelola sumber daya dalam pemerintahan di tingkat desa dan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, pemerintahan desa juga mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa.

Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan atau membantu kepala desa dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya. Perangkat desa diantaranya : sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemberdayaan masyarakat, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Setiap staf mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.

Pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan dokumen-dokumen kependudukan seperti surat pengantar kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berbagai surat pengantar serta surat keterangan lainnya yang dimintai warga untuk berbagai keperluan. Pemerintah desa diharuskan untuk melaporkan perkembangan kependudukan kepada dinas di kabupaten atau kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil atau melalui perwakilannya di kecamatan, sebagai pihak yang dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat dalam wilayahnya. Pemerintah desa juga seringkali diminta data kependudukan oleh instansi pemerintah diatasnya.

Petugas desa Jatiwaringin awalnya membuat dokumen-dokumen kependudukan dengan menggunakan mesin ketik. Setelah mendapat bantuan dari pemerintah berupa komputer, printer, dan lainnya petugas desa mulai menggunakan komputer untuk membuat dokumen kependudukan, akan tetapi hanya sebatas pada pembuatan surat pengantar kartu tanda penduduk dan surat keterangan lainnya. Untuk pendataan kelahiran, kematian, dan lainnya masih dicatat dalam buku secara terpisah. Hal ini amat disayangkan, karena komputer yang dimiliki saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sempitnya pengetahuan tentang teknologi informasi berbasis komputer mengakibatkan rendahnya pelayanan terhadap masyarakat dan desa Jatiwaringin cukup tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa lain.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Sistem

Pratama (2013:7) mengungkapkan: “Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan tugas bersama-sama.”

### B. Pengertian Rakyat, Penduduk, Warga

Supardi (2012:170) mendefinisikan: “Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.”

“Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Warga

mengandung arti peserta atau anggota dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan.” (Supardi, 2012:169).

Hazairin, mengungkapkan: “Rakyat adalah sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara dan diasuh oleh penguasanya.” (Supardi, 2012:170)

### C. Pengertian Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Jahja dkk (2014:4), mengungkapkan:

“Pengertian sistem administrasi dan informasi desa dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan sebagai suatu rangkaian atau sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa.”

### D. Undang-Undang Tentang Desa

Peraturan tentang desa telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 undang-undang tersebut, diperoleh definisi sebagai berikut:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

## III. ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

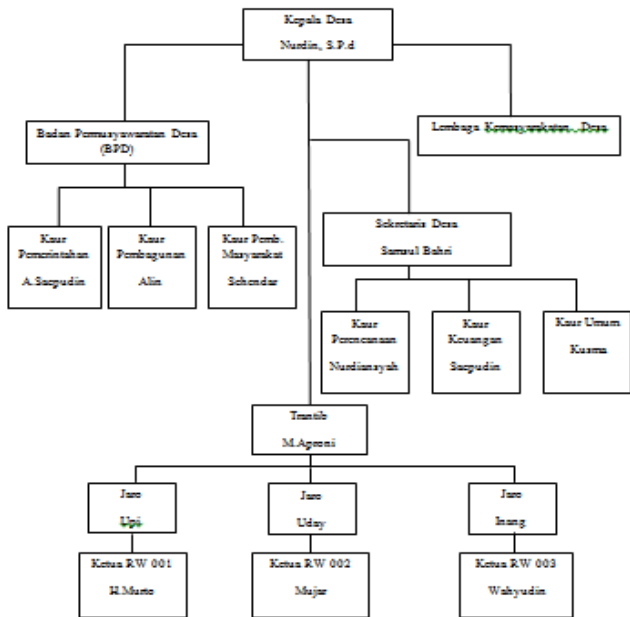
### A. Gambaran Umum Objek Yang Diteliti

Desa Jatiwaringin terbentuk pada tahun 1977, dengan luas wilayah 245.593m<sup>2</sup>. Sebelah barat berbatasan dengan desa Buaranjati, sebelah timur berbatasan dengan desa Kedung Dalem, sebelah utara berbatasan dengan desa Tegal Kunir Kidul, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Rajeg Mulya. Kantor desa Jatiwaringin terletak di Jalan Raya Mauk KM.16 RT 003/001 kecamatan Mauk kabupaten Tangerang propinsi Banten, dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang. Desa Jatiwaringin merupakan pemekaran dari desa Jati, yang kemudian di pecah menjadi dua yaitu desa Jatiwaringin dan desa Buaran jati. Dinamakan Jatiwaringin karena dulu

sebelum terjadinya pemekaran daerah ada sebuah pohon ceringin yang sangat besar di sebuah pusat perbelanjaan yang biasa disebut dengan pasar jati. Hingga pada akhirnya saat ada pemekaran dijadikanlah nama pohon ceringin sebagai nama sebuah tempat yaitu desa Jatiwaringin.

**B. Struktur Organisasi**

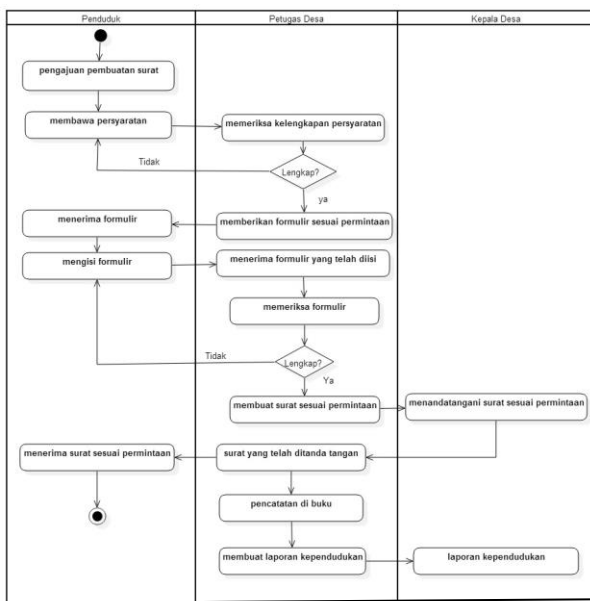
Pada Gambar 1 Struktur organisasi di kantor desa Jatiwaringin kecamatan Mauk, dimana wewenang yang dimiliki oleh atasan diturunkan langsung pada bawahan, dan bawahan bertanggung jawab terhadap atasan.



Sumber sekunder (2016)

Gambar 1. Struktur Organisasi kantor Desa Jatiwaringin.

**C. Tata laksana Sistem Yang Berjalan**



Gambar 2. Activity Diagram Sistem Berjalan

Berdasarkan gambar 2 maka prosedur sistem berjalan ialah sebagai berikut:

1. Penduduk melakukan permohonan untuk pembuatan surat administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Administrasi kependudukan antara lain:
  - a. Surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  - b. Surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - c. Surat keterangan kelahiran
  - d. Surat keterangan kematian
2. Penduduk mengajukan permohonan dengan membawa persyaratan antara lain:
  - a. Jika penduduk akan membuat surat pengantar KK maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan dari RT/RW, KTP, KK lama.
  - b. Jika penduduk akan membuat surat pengantar KTP maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan dari RT/RW, KK, KTP lama.
  - c. Jika penduduk akan membuat surat keterangan kelahiran maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan dan KK.
  - d. Jika penduduk akan membuat surat keterangan kematian maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan kematian dari rumah sakit (jika ada) dan KK.
3. Petugas desa memeriksa kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh penduduk sesuai dengan permintaan surat yang diinginkan.
4. Jika persyaratan tidak lengkap maka petugas desa akan meminta penduduk untuk melengkapi persyaratan.
5. Jika persyaratan sudah lengkap maka petugas desa akan memberikan formulir untuk diisi oleh penduduk.
6. Penduduk mengisi formulir lalu menyerahkan kembali (formulir yang telah diisi) ke petugas desa.
7. Petugas memeriksa formulir. Jika formulir tidak lengkap maka petugas desa akan mengembalikan ke penduduk untuk dilengkapi. Jika formulir sudah lengkap maka petugas desa membuat surat administrasi kependudukan sesuai dengan permintaan yang diajukan penduduk.
8. Surat administrasi kependudukan yang dibuat petugas desa sesuai dengan permohonan yang diajukan penduduk antara lain:
  - a. Surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK), untuk membuat KK baru atau merubah data (menambah atau mengurangi anggota keluarga).
  - b. Surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk membuat KTP baru atau merubah data (alamat dan lain sebagainya).
  - c. Surat keterangan kelahiran
  - d. Surat keterangan kematian
9. Petugas desa membawa surat ke kepala desa untuk ditandatangani.
10. Petugas desa memberikan surat yang telah ditandatangani oleh kepala desa ke penduduk.
11. Petugas desa mencatat setiap surat yang keluar dari desa (surat yang diminta penduduk) ke dalam buku.

Pencatatan ini dilakukan setiap hari apabila ada penduduk yang meminta dibuatkan surat administrasi kependudukan untuk berbagai keperluan.

12. Petugas desa membuat laporan kependudukan berdasarkan catatan dibuku. Laporan ini dibuat satu bulan sekali.
13. Petugas desa menyerahkan laporan kependudukan ke kepala desa.

**D. Masalah yang Dihadapi**

Adapun masalah yang dihadapi pada sistem berjalan saat ini antara lain adalah:

1. Pengolahan data kependudukan di desa Jatiwaringin saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, dan lainnya.
2. Terjadinya kehilangan atau kesalahan dalam pengolahan data yang menyebabkan sulitnya proses pencarian data dan proses administrasi yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Adanya duplikasi data pada saat pencatatan data penduduk.
4. Sulitnya mendapat laporan yang cepat dan akurat.

**E. Alternatif Pemecahan Masalah**

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka alternatif pemecahan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Dengan perancangan sistem administrasi kependudukan berbasis komputer, proses pengolahan data kependudukan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
2. Dengan perancangan sistem administrasi kependudukan yang terkomputerisasi proses pencarian data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
3. Dengan perancangan sistem database, data tersimpan secara aman dan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan atau kerangkapan data.
4. Dengan perancangan sistem administrasi kependudukan berbasis komputer pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

**IV. RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN**

**A. Usulan Prosedur Yang Baru**

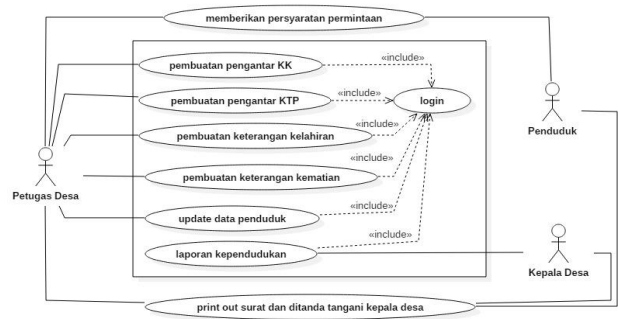
Prosedur dari sistem administrasi kependudukan yang diusulkan pada desa Jatiwaringin kecamatan Mauk terdiri dari prosedur pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga (KK), surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, serta laporan kependudukan. Dengan adanya perancangan sistem informasi administrasi kependudukan ini, diharapkan pengolahan data untuk administrasi kependudukan dapat memudahkan dan menghasilkan data yang cepat dan akurat. Adapun perancangan sistem yang diusulkan ini dibangun bersifat pemrograman berbasis objek atau dikenal juga dengan singkatan OOAD (*Object Oriented Analysis and Design*) yang

kemudian dijelaskan dengan menggunakan notasi UML (Unified Modeling Language). Sedangkan untuk pembuatan perangkat lunak dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman VB 06 (*Visual Basic 06*) dan sebagai penyimpanan data menggunakan database MySQL.

**B. Diagram Rancang Sistem**

Proses perancangan ini adalah untuk perancangan sistem yang akan dibentuk yang dapat berupa penggambaran proses-proses suatu elemen-elemen dari suatu komponen.

Sebuah *Use Case* mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dan sistem.



Gambar 3. Use Case yang Diusulkan

Dalam *Use Case Diagram* pada gambar 3, ada beberapa aktor yang terlibat dalam sistem. Diantaranya adalah Petugas Desa, Penduduk, dan Kepala Desa.

Tabel 1. Deskripsi Aktor dalam Use Case

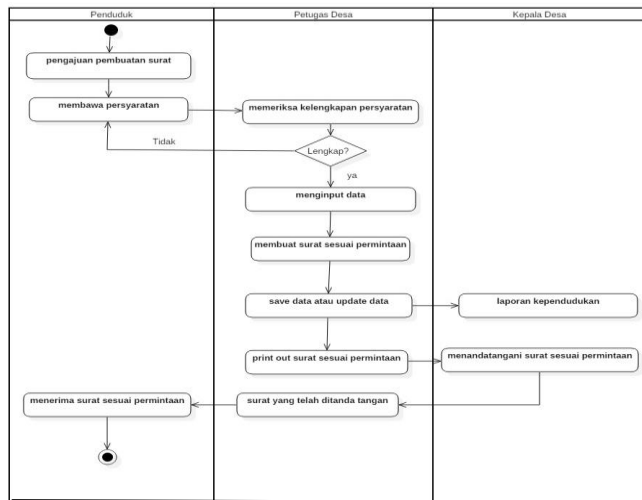
No	Aktor	Deskripsi
1	Petugas Desa	Aktor yang mempunyai hak semua akses, untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan.
2	Penduduk	Aktor yang melakukan permintaan pembuatan surat administrasi (surat pengantar pembuatan KTP, surat pengantar pembuatan KK, surat keterangan kelahiran, dan surat keterangan kematian). Menerima hasil berupa <i>print out</i> surat administrasi kependudukan.
3	Kepala Desa	Aktor yang mempunyai hak akses untuk melihat laporan kependudukan.

Tabel 2. Deskripsi Use Case

No	Use Case	Deskripsi
1	Memberikan Persyaratan Permintaan	Penduduk melakukan permintaan pembuatan surat dan memberikan persyaratan sesuai dengan surat yang diminta.
2	Pembuatan Pengantar KK	Petugas desa membuat surat pengantar KK
3	Pembuatan Pengantar KTP	Petugas desa membuat surat pengantar KTP
4	Pembuatan Keterangan Kelahiran	Petugas desa membuat surat keterangan kelahiran

5	Pembuatan Keterangan Kematian	Petugas desa membuat surat keterangan kematian
6	Update Data Penduduk	Petugas desa mengupdate data dan menyimpannya di <i>database</i>
7	Laporan Kependudukan	Kepala desa melihat laporan sesuai dengan data yang telah tersimpan di <i>database</i>
8	Print Out Surat dan Ditanda Tangan Kepala Desa	Petugas desa memprint surat yang telah dibuat dan meminta kepala desa untuk menandatangani surat. Surat yang telah ditandatangani akan diberikan ke penduduk.

Activity Diagram (diagram aktivitas) adalah diagram yang menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagram aktifitas dapat digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis (*business work flow*). Dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (*flow of events*).



Gambar 4. Activity Diagram Sistem yang Diusulkan

Berdasarkan gambar 4 tahapan Activity Diagram yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Penduduk melakukan permohonan untuk pembuatan surat administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Administrasi kependudukan antara lain:
  - a. Surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  - b. Surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - c. Surat keterangan kelahiran
  - d. Surat keterangan kematian
2. Penduduk mengajukan permohonan dengan membawa persyaratan antara lain:
  - a. Jika penduduk akan membuat surat pengantar KK maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan dari RT/RW, KTP, KK lama.
  - b. Jika penduduk akan membuat surat pengantar KTP maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan dari RT/RW, KK, KTP lama.

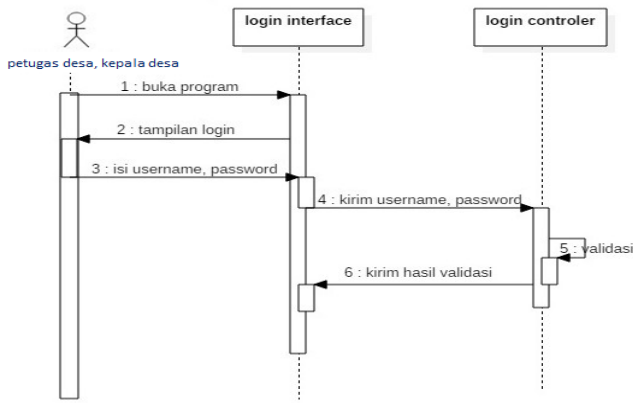
- c. Jika penduduk akan membuat surat keterangan kelahiran maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan dan KK.
- d. Jika penduduk akan membuat surat keterangan kematian maka persyaratan yang harus dibawa adalah surat keterangan kematian dari rumah sakit (jika ada) dan KK.

3. Petugas desa memeriksa kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh penduduk sesuai dengan permintaan surat yang diinginkan.
4. Jika persyaratan tidak lengkap maka petugas desa akan meminta penduduk untuk melengkapi persyaratan.
5. Jika persyaratan sudah lengkap maka petugas desa akan menginput data sesuai dengan data yang diberikan oleh penduduk.
6. Setelah menginput data petugas desa melakukan save atau update data.
7. Surat administrasi kependudukan yang dibuat petugas desa sesuai dengan permohonan yang diajukan penduduk antara lain:

- a. Surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK), untuk membuat KK baru atau merubah data (menambah atau mengurangi anggota keluarga).
- b. Surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk membuat KTP baru atau merubah data (alamat dan lain sebagainya).
- c. Surat keterangan kelahiran
- d. Surat keterangan kematian

8. Kepala desa dapat melihat laporan sesuai dengan data yang tersimpan di *database*.
9. Petugas desa melakukan print surat sesuai permintaan dan membawa surat ke kepala desa untuk ditandatangani.
10. Petugas desa memberikan surat yang telah ditandatangani oleh kepala desa ke penduduk.

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu yang berurutan. Tetapi pada dasarnya *sequence diagram* digunakan dalam lapisan abstraksi model objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, juga interaksi antar objek, dan menunjukkan sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Komponen utama *sequence diagram* terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama, pesan diwakili oleh garis dengan tanda panah, dan waktu yang ditunjukkan dengan proses vertikal. Berikut adalah *sequence diagram*.

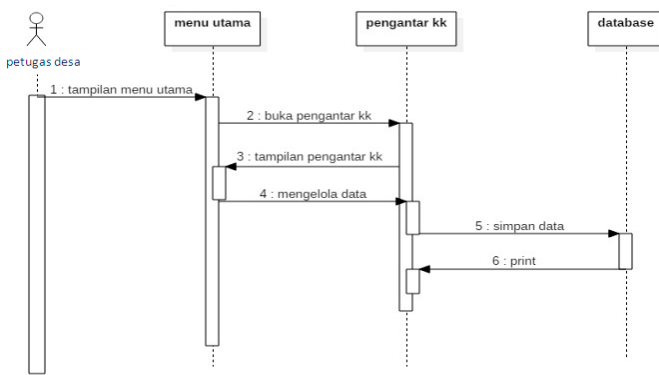


Gambar 5. Sequence Diagram Login

Pada gambar 5 diatas dapat dilihat bahwa ada 2 kelas yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Login interface
2. Login controller

Gambar 5 diatas merupakan Sequence Diagram Login, proses di mulai dengan petugas desa atau kepala desa membuka aplikasi terlebih dahulu, kemudian petugas desa atau kepala desa melakukan login dengan memasukan username dan password untuk selanjutnya di validasi apakah sesuai atau tidak, dan jika sesuai sistem menampilkan halaman utama.

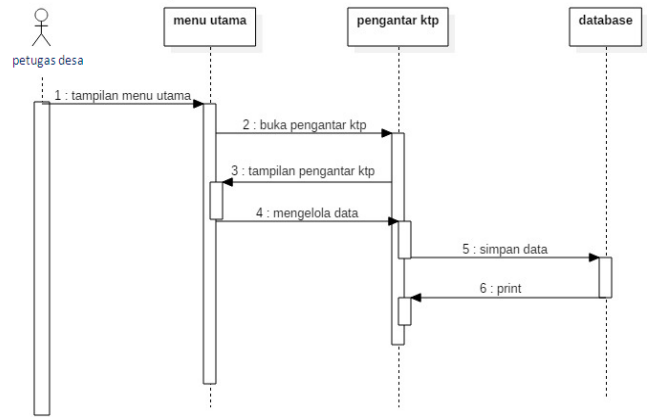


Gambar 6. Sequence Diagram Pengantar KK

Pada gambar 6 diatas dapat dilihat bahwa ada 3 kelas yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Halaman utama
2. Pengantar KK
3. Database

Gambar 6 diatas merupakan Sequence Diagram pengantar KK, saat petugas desa berhasil masuk ke halaman utama pilih Pengantar KK kemudian mengelola data penduduk, selanjutnya data di simpan kedalam database.

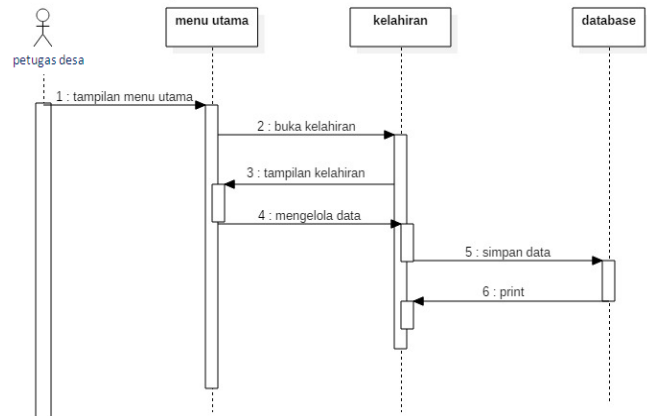


Gambar 7. Sequence Diagram Pengantar KTP

Pada gambar 7 diatas dapat dilihat bahwa ada 3 kelas yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Halaman utama
2. Pengantar KTP
3. Database

Gambar 7 diatas merupakan Sequence Diagram pengantar KTP, saat petugas desa berhasil masuk ke halaman utama pilih Pengantar KTP kemudian mengelola data penduduk, selanjutnya data di simpan kedalam database.

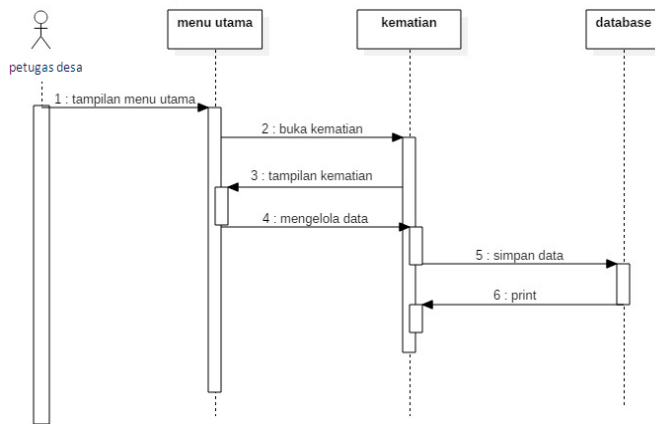


Gambar 8. Sequence Diagram Keterangan Kelahiran

Pada gambar 8 diatas dapat dilihat bahwa ada 3 kelas yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Halaman utama
2. Kelahiran
3. Database

Gambar 8 diatas merupakan Sequence Diagram keterangan kelahiran, saat petugas desa berhasil masuk ke halaman utama pilih Kelahiran kemudian mengelola data penduduk, selanjutnya data di simpan kedalam database.

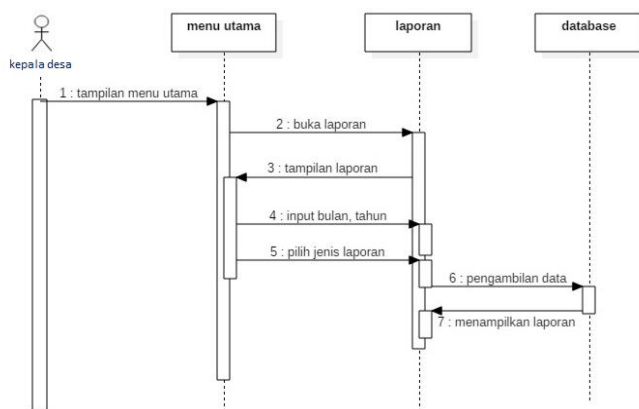


Gambar 9. Sequence Diagram Keterangan Kematian

Pada gambar 9 diatas dapat dilihat bahwa ada 3 kelas yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Halaman utama
2. Kematian
3. Database

Gambar 9 diatas merupakan *Sequence Diagram* keterangan kematian, saat petugas desa berhasil masuk ke halaman utama pilih Kematian kemudian mengelola data penduduk, selanjutnya data di simpan kedalam *database*.



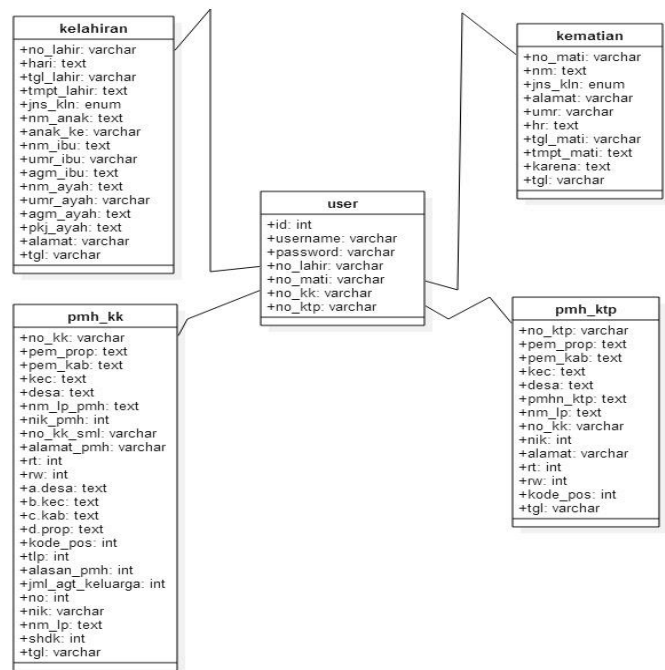
Gambar 10. Sequence Diagram Melihat Laporan

Pada gambar 10 diatas dapat dilihat bahwa ada 3 kelas yang saling berinteraksi, yaitu :

1. Halaman utama
2. Laporan
3. Database

Gambar 10 diatas merupakan *Sequence Diagram* melihat laporan, saat kepala desa berhasil masuk ke halaman utama pilih laporan menginput bulan dan tahun lalu memilih jenis laporan, selanjutnya sistem akan menampilkan laporan sesuai dengan jenis laporan yang dipilih.

*Class diagram* pada gambar 11 merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem, dengan melihat karakteristik sistem aplikasi dokumentasi kependudukan beserta proses – proses yang terjadi maka dapat dibuat *Class Diagram* berikut ini :



Gambar 11. Class Diagram yang Diusulkan

### C. Rancangan Tampilan

#### a. Tampilan Login

Pada gambar 12 Petugas desa atau kepala desa melakukan *login* dengan mengisi *username* dan *password*

**DESA JATIWARINGIN KECAMATAN MAUK**  
**Jl. Raya Mauk KM. 16**

**Username** :

**Password** :

Gambar 12. Tampilan Login

Pada gambar 13 tampilan menu utama terdapat 6 menu yaitu: beranda, pengantar KK, pengantar KTP, kelahiran, kematian, dan laporan.



Gambar 13. Tampilan Menu Utama

Pada gambar 14 tampilan profil desa berisi mengenai gambaran umum desa Jatiwaringin.



Gambar 14. Tampilan Profil Desa

Pada gambar 15 tampilan profil desa berisi mengenai visi dan misi desa Jatiwaringin.



Gambar 15. Tampilan Visi dan Misi

Pada gambar 16 tampilan profil kepala desa berisi mengenai biodata kepala desa.



Gambar 16. Tampilan Profil Kepala Desa

Pada gambar 17 tampilan profil kaur umum berisi mengenai biodata kaur umum.



Gambar 17. Tampilan Profil Kaur Umum

Pada gambar 18 tampilan pengantar KK, yaitu form untuk mengisi data penduduk yang diperlukan untuk membuat surat pengantar KK.



Gambar 18. Tampilan Pengantar KK

Pada gambar 19 tampilan pengantar KTP, yaitu form untuk mengisi data penduduk yang diperlukan untuk membuat surat pengantar KTP.



**PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK**

No :

Pemerintah Propinsi :

Pemerintah Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Permohonan KTP :  Baru  Perpanjangan  Pergantian

Nama Lengkap :

No. KK :

NIK :

Alamat :  RT  RW

Tanggal :  Kode Pos

Gambar 19. Tampilan Pengantar KTP

Pada gambar 20 tampilan kelahiran, yaitu form untuk mengisi data penduduk yang diperlukan untuk membuat surat keterangan kelahiran.

**SURAT KELAHIRAN**

No :  Umur :

Hari :  Agama :

Tanggal :  Nama Ayah :

Di :  Umur :

Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan Agama :

Nama Anak :  Pekerjaan :

Anak Ke :  Alamat :

Nama Ibu :  Tanggal Surat :

Gambar 20. Tampilan Kelahiran

Pada gambar 21 tampilan kematian, yaitu form untuk mengisi data penduduk yang diperlukan untuk membuat surat keterangan kematian.

**SURAT KEMATIAN**

No :

Nama :

Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Alamat :

Umur :

Hari :

Tanggal :

Di :

Disebabkan :

Tanggal Surat :

Gambar 21. Tampilan Kematian

Pada gambar 22 tampilan laporan, yaitu form untuk melihat laporan.

**LAPORAN**

Tahun :

Bulan :

Gambar 22. Tampilan Laporan

**V. KESIMPULAN**

Sistem administrasi kependudukan ini dapat mempermudah petugas desa dalam pengelolaan data kependudukan. Dengan sistem administrasi kependudukan berbasis komputer dapat meningkatkan ketelitian dalam proses pengelolaan data penduduk, karena dengan sistem yang berbasis komputer dapat menghindari terjadinya kerangkapan data. Sistem administrasi kependudukan dengan berbasis komputer dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan kependudukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] R. Jahja, dkk. Sistem Administrasi dan Informasi Desa, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- [2] Pratama, Putu Agus Eka. Sistem Informasi dan Implementasinya, Bandung: Informatika, 2013.
- [3] Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [4] W. Supardi, Pendidikan Kewarganegaraan 1, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.
- [5] W. Supardi, Pendidikan Kewarganegaraan 3,Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.